

ANALISIS DAN SINTESIS HASIL PELAKSANAAN KELOMPOK USAHA AGRIBISNIS TERPADU (KUAT) DALAM PROGRAM P3T¹

Sugiarto dan Hendiarto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian
Jl. A. Yani 70 Bogor 16161

PENDAHULUAN

Dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas pertanian, khususnya padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bekerjasama dengan instansi teknis terkait lingkup Departemen Pertanian melaksanakan kegiatan percontohan Peningkatan Produktivitas Padi Terpadu (P3T). Dalam kegiatan ini akan dikembangkan program Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) Padi Sawah Irigasi, Sistem Integrasi Padi – Ternak (SIPT), Pengembangan Padi Hibrida/Padi Tipe Baru, dan pelayanan jasa keuangan model Kredit Usaha Mandiri (KUM).

Pada dasarnya agar pengembangan percontohan tersebut berjalan secara berkesinambungan dan saling menunjang, diperlukan rekayasa kelembagaan yang dapat mengatur hubungan antara manusia untuk penguasaan faktor produksi yang langka (Badan Agribisnis, 1998). Hal ini dimungkinkan dengan adanya inovasi teknologi yang dapat memberikan manfaat bagi penggunanya. Salah satu kelembagaan yang akan ditumbuhkembangkan dalam kegiatan P3T adalah lembaga Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT).

KUAT merupakan rekayasa kelembagaan yang dikembangkan dalam P3T dan diharapkan dapat mewujudkan lembaga keuangan mikro yang berorientasi agribisnis di pedesaan. Dalam hal ini petani didorong mampu berperan sebagai pengusaha dan pelaku agribisnis penunjang usahatani dan rumahtangga di percontohan P3T. Terbentuknya kelembagaan KUAT dalam P3T, diharapkan dapat; (a) Menggerakkan petani dalam penerapan seluruh komponen P3T yang berkelanjutan, (b) Mengelola dana batuan dari kegiatan P3T, untuk disalurkan sebagai bantuan kredit usaha bagi kelompok sasaran, (c) Mengelola administrasi pembukuan dan keuangan dana bantuan secara professional dan bankable, serta (d) Menggalang dana masyarakat/kelompok sebagai penguatan modal untuk melakukan kegiatan usaha agribisnis.

Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis dan melakukan sintesis pelaksanaan KUAT dalam program P3T, sebagai lembaga yang mandiri dan sebagai sarana keberlanjutan inovasi teknologi program.

¹ Makalah disampaikan pada Lokakarya "Program Peningkatan Produktivitas Padi Terpadu (P3T), Puslitbang Tanaman Pangan, tanggal 17-18 Desember 2003 di Yogyakarta.

Keluaran

Keluaran yang diharapkan berupa informasi hasil analisis dan sintesis pelaksanaan KUAT dalam program P3T, sebagai lembaga yang mandiri dan sebagai sarana keberlanjutan inovasi teknologi program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Proses Pembentukan KUAT

Agar alur pikir dalam pembentukan KUAT sebagai lembaga yang menunjang kegiatan P3T yang berkelanjutan dan mandiri menjadi optimal, maka diperlukan suatu proses pembinaan dan pengendalian terhadap beberapa input sehingga akan diperoleh output secara optimal (Gambar 1). Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa input yang mempengaruhi proses pembentukan KUAT terdiri dari input terkontrol yang dapat diadakan dan dilaksanakan, input tak terkontrol yang sulit diperkirakan pengaruhnya serta input lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pembentukan KUAT secara situasional.

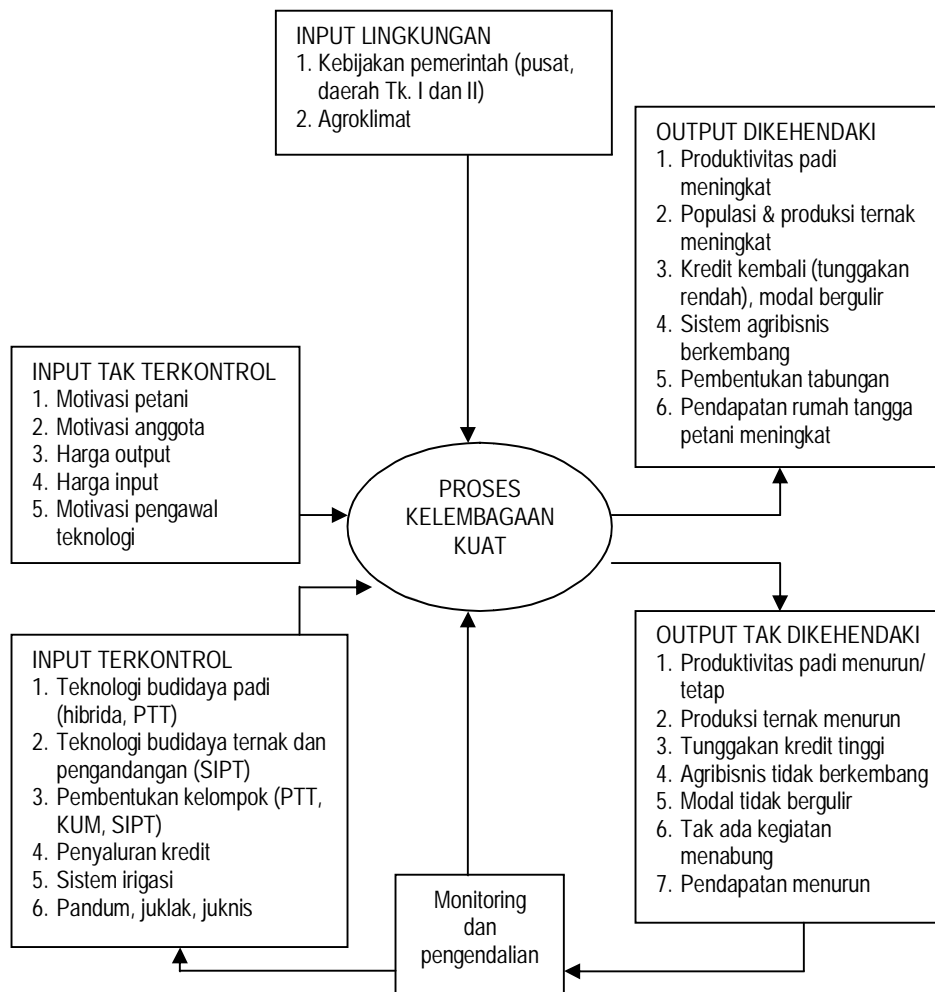
KUAT sebagai lembaga baru dalam proses pembentukannya akan mengalami berbagai kendala yang dapat dipengaruhi oleh adanya kualitas input dan pengaruh dominasi masing – masing input yang mempunyai kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Dalam hal ini apabila salah satu input mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pembentukan KUAT maka akan mempengaruhi keseimbangan output yang akan dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka output yang diharapkan adalah output yang dikehendaki, yaitu adanya peningkatan produktivitas padi, meningkatnya populasi ternak, berkembangnya usaha-usaha skala kecil di sektor pertanian dan nonpertanian yang ada di pedesaan serta meningkatkan budaya menabung di antara pelaku agribisnis skala kecil dan menengah di pedesaan. Sedangkan output yang tidak dikehendaki akan terus dimonitor dan dikendalikan untuk diketahui penyebabnya, sehingga akan mampu menjadi input yang berkualitas dan mempunyai pengaruh yang baik terhadap proses penumbuhan kelembagaan dan output yang diharapkan.

Penyebaran Lokasi, Jumlah Anggota KUAT

Penyebaran lokasi kegiatan KUAT berada di 11 provinsi, 21 kabupaten dan kecamatan, serta menyebar di 35 desa. Jumlah kelompok tani yang terlibat ada 68 kelompok, dengan jumlah petani peserta dan masyarakat 7.219 orang pada tahun 2002, kemudian pada tahun 2003 meningkat menjadi 8.575 orang atau meningkat 1.356 orang (18,8%/tahun).

Banyaknya petani yang terlibat dalam pelaksanaan penumbuhan KUAT, menjadikan beban kegiatan KUAT sangat berat, karena harus mampu mengelola dan mengendalikan seluruh anggota di dalam kegiatan P3T.



Gambar 1. Diagram Sistem Pengembangan Kelembagaan KUAT

Organisasi dan Aturan Main pada Kegiatan KUAT Tahun 2003

Pembentukan organisasi KUAT dan struktur organisasi dari masing-masing wilayah telah dilaksanakan 100 persen, dengan memposisikan kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rapat anggota yang memilih wakil dari kelompok dan masyarakat yang duduk didalam Forum Perwakilan Kelompok (FPK). Dan selanjutnya fungsi dari FPK secara keseluruhan adalah untuk: (a) menyiapkan anggaran dasar, (b) membahas rencana kerja, (c) melakukan kontrol, (d) mengusulkan perubahan, dan (e) sebagai mediator antara pengurus dan anggota. Selain itu sebagai pengelola kegiatan KUAT telah dibentuk manager yang dibantu oleh beberapa seksi sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Sedangkan dalam pelaksanaan di daerah dalam pembentukan struktur

dan organisasi, ada sebagian wilayah yang mempunyai jumlah seksi yang lebih banyak, menyebabkan panjangnya jalur birokrasi yang kurang efisien.

Aturan main yang diterapkan dalam pelaksanaan KUAT (Soentoro et al., 2002) sebagai lembaga mengatur hak dan kewajiban (propertyright), batas yurisdiksi atau ikatan serta sanksi antara pengurus dan anggota. Penerapan aturan main yang dilaksanakan dari seluruh wilayah KUAT masih rendah yaitu sekitar 35,3 persen bagi yang telah melaksanakan dan 64,7 persen yang belum melaksanakan. Batas aturan main belum terlaksana adalah: (a) imbalan balas jasa pengurus, (b) iuran wajib setiap anggota, (c) anggota berhak mengetahui dana kelompok yang dikelola oleh KUAT, (d) menarik dana pinjaman untuk digulirkan kembali kepada kelompoknya, (e) belum ada penerapan sanksi yang tegas dan (f) pertemuan reguler seluruh anggota dan pengurus, serta pertanggungjawaban dalam bentuk AD/RT yang masih rendah pelaksanaannya (24%).

Tabel 1. Organisasi dan Aturan Main pada Kegiatan KUAT, Tahun 2003

Uraian	Keragaan KUAT (%) [*]	
	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan
A. Organisasi		
1. Pembentukan organisasi	100	0
2. Pembentukan struktur organisasi	100	0
B. Aturan Main		
1. Pembagian hak dan tanggungjawab	35,3	64,7
2. Pembuatan AD/RT	24,6	76,4
3. Fungsi dan tugas pengurus KUAT	24,6	76,4
C. Tingkat Pertemuan		
1. Antar pengurus	70,5	29,5
2. Antar pengurus dan seluruh anggota KUAT	0	100
3. Pengurus dan anggota	82,3	17,7
D. Interval Pertemuan		
1. Sekali sebulan	23,5	76,5
2. Lebih sebulan sekali	11,7	88,3
3. Tidak tentu	64,7	35,3

Keterangan : *) empat lokasi KUAT belum melaporkan

Pertemuan antara pengurus dan anggota KUAT belum sepenuhnya dilakukan secara reguler dan masih bersifat insidental dengan periode yang tidak tetap. Penyebabnya antara lain: (a) terpecahnya domisili anggota yang menyebar di beberapa desa, (b) besarnya jumlah anggota, yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pertemuan secara serentak, karena terbatasnya penyediaan lokasi dan dana, (c) anggota kurang percaya dan mengerti tentang kinerja KUAT, karena lemahnya sosialisasi dalam menyatukan persepsi dan (d) perhatian dinas terkait dalam memfasilitasi kinerja pertemuan KUAT belum dilakukan secara optimal.

Sarana Pendukung dan Ketersediaan Tenaga Operator Kegiatan KUAT

Ketersediaan sarana pendukung seperti sarana komputer, printer dan sarana perlengkapan kantor (meja kursi, filling cabinet, brankas) baru dipenuhi 88 persen, sedangkan tempat perkantoran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan baru dipenuhi 35 persen termasuk beberapa sarana lain yang melengkapi kegiatan kesekretariatan seperti perlengkapan kantor (meja kursi, filling cabinet, brankas).

Dalam sistem penyaluran dan pengamanan dana BLM, pengelola KUAT harus mempunyai buku rekening bank guna mempermudah pencairan dan pemasukan uang dari anggotanya. Dalam pelaksanaannya pengelola KUAT yang telah membuka buku rekening bank mencapai 58 persen, sedangkan 42 persen berada di ketua kelompok atau lembaga tertentu yang akses terhadap pengaturan dana BLM. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen satu pintu di dalam mengatur dana BLM belum sepenuhnya dipercayakan pada pengurus KUAT dan hanya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kelompok atau pihak tertentu yang memiliki akses terhadap pengelolaan dana BLM.

Ketersediaan tenaga penunjang operasional komputer yang bertugas untuk laporan manajemen administrasi pembukuan, keuangan, dan laporan fisik baru terlaksana 71 persen dari total wilayah KUAT yang ada, sedangkan 29 persen yang belum terlaksana, dan masih ditangani oleh petugas pendamping atau tenaga yang direkrut oleh pengurus KUAT/Kelompok sesuai dengan tingkat keperluannya (Tabel 2).

Tabel 2. Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Rekening Pada Kegiatan KUAT, Tahun 2003

Uraian	Keragaan KUAT (%) *	
	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan
Perkantoran/posko	35,3	64,7
Komputer	88,2	11,7
Ketersediaan tenaga operasional komputer	71,6	29,4
Keberadaan rekening di KUAT	58,9	41,1

Keterangan : *) empat lokasi KUAT belum melaporkan

Keragaan Tenaga Pendamping

Tenaga pendamping di lokasi KUAT adalah tenaga peneliti dari BPTP yang secara umum telah menerima pembekalan dari beberapa materi yang digunakan untuk menumbuhkembangkan KUAT.

Pada kegiatan penumbuhan KUAT TA 2002, hampir seluruh tenaga pendamping (100%) berada di lokasi, namun pada TA 2003 keberadaan tenaga pendamping di lokasi turun menjadi 47 persen dan 57 persen ditarik oleh unit kerja masing-masing. Selanjutnya untuk lokasi yang tidak didampingi petugas, sebagian besar sudah dialihkan kepada pengurus KUAT dari masyarakat setempat (Tabel 3).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa dalam jangka waktu yang relatif pendek, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan KUAT, secara rasional kurang dapat diharapkan menjadi kelembagaan KUAT sebagai lembaga yang mandiri dan mampu mengatasi permasalahan yang kompleks dalam pelaksanaan kegiatan P3T. Walaupun demikian, dari segi pembinaan dan monitoring pengembangan KUAT masih tetap dilakukan oleh BPTP setempat. Salah satu penyebab menurunnya jumlah pendamping di lokasi adalah masalah insentif petugas pendamping yang belum diterima atau tidak dianggarkan pada tahun 2003

Tabel 3. Keragaan Tenaga Pendamping dan Insentif pada Kegiatan KUAT 2003

Uraian	Keragaan sudah dilaksanakan	KUAT (%) belum dilaksanakan
Keberadaan tenaga BPTP/pendamping di lokasi	58,8	41,2
Tenaga pendamping di lokasi termasuk yang dilatih di Bogor	35,3	64,7
Tenaga pendamping yang berstatus peneliti	87,5	12,5
Petugas pendamping yang menerima insentif s/d 2003	47	53

Keterangan : *) empat lokasi KUAT belum melaporkan

Kegiatan Pelaporan

Seiring dengan kurang kontinunya petugas pendamping yang ditugaskan di lokasi kegiatan P3T hingga tahun 2003, mengakibatkan dampak yang kurang baik terhadap rutinitas pelaporan hasil, baik itu berupa laporan fisik dan keuangan dari seluruh komponen kegiatan P3T (PTT, SIPT dan KUM) baik itu kepada BPTP maupun dinas teknis terkait. Pada tahun 2002 hampir 100 persen petugas pendamping di lokasi melaporkan keadaan fisik dan keuangan yang dilakukan rutin dengan interval waktu bulanan. Kemudian pada tahun 2003 jumlah tenaga pendamping turun menjadi 47 persen dan masih tetap melaporkan secara rutin, sedangkan 57 persen lainnya yang melaporkan secara insidental, bahkan hanya melaporkan apabila ada kepentingan tertentu.

Keragaan Pelaksanaan KUAT

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari para tenaga pendamping, diperoleh informasi bahwa dari 21 lokasi kegiatan KUAT hanya terdapat 12 lokasi yang melaporkan adanya pengembalian kredit pinjaman sarana produksi. Sisanya sebanyak sembilan lokasi lainnya tidak melaporkan tentang pengembalian kredit pinjaman, seperti tertuang dalam Tabel 4.

Tabel 4. Beberapa Kasus Penyaluran dan Pengembalian Kredit PTT di Beberapa Lokasi

MT	Uraian	Jml lokasi	Nilai (Rp)
I	Jumlah kredit yang disalurkan	12	757.779.175
	Jumlah kredit yang dikembalikan		471.512.752
II	Jumlah kredit yang disalurkan	4	376.688.784
	Jumlah kredit yang dikembalikan		336.958.195
III	Jumlah kredit yang disalurkan	4	413.888.550
	Jumlah kredit yang dikembalikan		261.049.227

Dari 12 lokasi jumlah dana yang tersalurkan pada Musim Tanam I sejumlah Rp 757.779.175,- dan dana yang dikembalikan sejumlah Rp 471.512.752. Untuk Musim Tanam II, dari 12 lokasi hanya di empat lokasi terjadi penyaluran kredit sejumlah Rp 376.688.784 dan yang berhasil ditarik kembali sejumlah Rp 336.958.195 sudah termasuk bunganya. Untuk musim berikutnya (MT III), terdapat empat lokasi yang melanjutkan penyaluran kredit usahatani dengan jumlah kredit sebesar Rp 413.888.550 dan pinjaman yang dikembalikan baru sejumlah Rp 261.049.227 (termasuk bunga pinjaman), karena masih ada yang belum panen, sehingga belum jatuh tempo.

Sistem Integrasi Padi – Ternak (SIPT)

Di beberapa lokasi harga sapi cukup mahal, terutama di Pulau Jawa. Tetapi di lokasi-lokasi sumber ternak sapi seperti Nusa Tenggara Barat, Bali, harga sapi relatif murah, sehingga dengan plafon dana yang sama dapat diperoleh jumlah sapi lebih banyak. Penyaluran dan sistem kepemilikan ternak kepada petani anggota KUAT ada yang secara kredit, tetapi ada juga yang bagi hasil. Sistem pengusahaan ternak dapat berupa penggemukan atau pembibitan. Memasuki tahun kedua pelaksanaan SIPT, pengembalian modal kelompok baik yang disalurkan secara kredit ataupun bagi hasil dapat dikatakan masih sangat kecil. Bagi yang mengambil sistem bagi hasil (pembibitan), memang belum waktunya untuk menyeter ternak sebagai kewajibannya, walaupun sudah berkembang biak. Jumlah ternak yang semula 1.730 ekor (dari 19 lokasi yang melaporkan) telah berkembang menjadi 2.123 ekor, atau bertambah sebanyak 393 ekor. Pupuk kandang yang berhasil dikumpulkan sebanyak 914 ton (dari 12 lokasi yang melaporkan) senilai Rp 234.390.000,- atau seharga Rp 256.500,- per ton.

Kredit Usaha Mandiri (KUM)

Dalam pengembangan KUM selama setahun berjalan, telah terlihat adanya perkembangan yang positif. Dari hasil laporan penanggung jawab kegiatan P3T di daerah/lokasi, diperoleh gambaran bahwa suntikan modal (seed capital) telah bertambah dan berkembang. Yang lebih penting bahwa kegiatan KUM sangat

membantu kaum pengusaha (kecil) yang merasa kesulitan untuk memperoleh tambahan modal guna pengembangan usahanya (Soeharto, 1996 dan Soentoro et al., 1999), di samping telah terjadi pemupukan dana tabungan. Data keragaan akumulasi dana yang dikelola oleh lembaga pelayanan jasa keuangan KUM disajikan dalam Tabel 5. Karena tidak semua lokasi melaporkan komponen keuangan KUM secara lengkap, maka data/angka yang disajikan dalam Tabel 5 ini diambil dari lokasi-lokasi yang menyajikan data secara lengkap.

Dari seluruh lokasi, terdapat 15 lokasi yang melaporkan bahwa dari jumlah dana awal sebanyak Rp 774.500.000 telah berkembang menjadi Rp 1.063.969.000 atau meningkat 137,3 persen dari modal awal (dalam jangka waktu satu tahun atau lebih). Sebagian besar dari jumlah tersebut berada di tangan nasabah. Ini menunjukkan bahwa model KUM cukup lancar dalam menyalurkan dana. Kelancaran penyaluran dana juga dapat dilihat dari besarnya Dana Tabungan Kelompok (DTK) yang dihimpun dari pemotongan pada setiap peminjaman.

Tabel 5. Keragaan Akumulasi Dana Pelayanan Jasa Keuangan model KUM (Rp 000)

Posisi uang per Oktober 2003			Akumulasi dana nasabah tahun 2003		
Uraian	Jumlah	%	Uraian	Jumlah	%
Lokasi	15		Lokasi	15	
Modal awal (Rp 000)	774.500	100,0	Modal awal (Rp 000)	774.500	100,0
Posisi Oktober (Rp 000)			Akumulasi dana (Rp 000)		
a. Uang di rekening	225.657	29,1	a. Bunga/jasa	119.339	15,4
b. Uang di nasabah	821.109	106,0	b. DTK	82.881	10,7
c. Uang di kas	17.203	2,2	c. Tabungan wajib	35.397	4,5
			d. Tabungan suka rela	51.852	6,7
d. Jumlah	1.063.969	137,3	e. Jumlah	289.469	37,3

Dilihat dari penggalangan dana masyarakat untuk akumulasi modal, kegiatan KUM juga telah berhasil menghimpun dana sejumlah Rp 289.469.000 atau sebesar 37,3 persen dari modal awal (termasuk bunga/jasa pinjaman) selama satu tahun. Hal yang lebih menarik lagi adalah Tabungan Sukarela masyarakat nilainya lebih tinggi dari Tabungan Wajib. Ini cukup memberi indikasi bahwa kesadaran masyarakat untuk menabung cukup tinggi, dan yang lebih penting adalah kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap KUM cukup tinggi (Ananta et al., 1998).

Keberhasilan Penumbuhan KUAT

Sebagai ilustrasi untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan penumbuhan dan kinerja KUAT, didekati dengan metode pembobotan dari beberapa indikator keberhasilan. Beberapa indikator umum yang terpilih adalah (a) pembentukan organisasi, (b) pembentukan struktur organisasi, (c) aturan main organisasi KUAT, (d) tingkat dan jadwal pertemuan, (d) ketersediaan sarana pendukung, (e) keberadaan

rekening KUAT, (f) kondisi pelaporan, (g) pelaksanaan perguliran dana BLM dari kegiatan PTT, (h) tingkat perkembangan populasi ternak dan (i) pelaksanaan pelayanan jasa keuangan model KUM menurut jenis akumulasi modal. Kemudian apabila ada indikator yang terbagi dalam beberapa subindikator, maka indikator tersebut akan ditentukan berdasarkan skalanya.

Berdasarkan nilai pembobotan dari indikator di atas, maka diperoleh kategori penumbuhan KUAT, antara lain: 11,8 persen wilayah yang dinilai berhasil menumbuhkan kinerja KUAT, 76,4 persen dinilai kurang berhasil, dan 11,6 persen; dinilai tidak berhasil dalam penumbuhan KUAT.

Implikasi dari tingkat keberhasilan penumbuhan KUAT adalah :

- a. Wilayah yang berhasil menumbuhkan kinerja KUAT, masih perlu dibina dan dibimbing oleh instansi yang terkait di dalam kegiatan P3T dengan menjaga keseimbangan antara indikator yang mendukung tingkat keberhasilan, serta mengadopsi teknologi penumbuhan KUAT secara bertahap ke wilayah lainnya.
- b. Bagi wilayah yang kurang berhasil, masih perlu dibina dan dibimbing lebih baik, serta dimonitor dan hasil evaluasi beberapa indikator yang kurang berhasil oleh instansi yang terkait dalam kegiatan program P3T, diupayakan memperbaiki penyebabnya sesuai dengan skala prioritas.
- c. Bagi wilayah yang tidak berhasil dalam penumbuhan KUAT, perlu ditinjau kembali bentuk penyimpangan indikator keberhasilan, dan diupayakan apabila satu atau beberapa indikator yang sangat kuat pengaruhnya, maka penumbuhan KUAT diprioritaskan sesuai dengan tingkat pengaruh kuat dari indikator tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN

Secara umum implementasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan KUAT sebagai lembaga yang mandiri untuk melayani jasa keuangan dalam melakukan usaha agribisnis di pedesaan masih lemah dan belum dapat dikategorikan sebagai lembaga yang sesuai dengan fungsinya. Di samping itu KUAT belum ditunjang oleh sistem manajemen yang terintegrasi dan masih berjalan secara spasial di antara komponen pendukungnya.

Penerapan aturan main (sanksi, hak, dan wewenang) di antara pengurus dan anggota masih bias pada anggota/petani atau kelompok, belum mempertimbangkan kemandirian dan keberlanjutan KUAT. Oleh karena itu, beberapa keputusan kebijakan untuk menumbuh kembangkan KUAT masih berorientasi pada kepentingan kelompok. Hal ini mungkin sistem pengendali dan monitoring dalam pengembangan KUAT seperti adanya pelaksanaan AD/RT belum sepenuhnya dibuat dan diimplementasikan dalam pertemuan anggota

Koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan KUAT secara umum belum menunjukkan arah pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan/berkelanjutan dan masih berpola pikir keproyekan. Di samping itu tenaga pendamping yang mempunyai kapasitas untuk pengawalan teknologi belum dimanfaatkan secara optimal, karena penyediaan sumber dana hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya keproyekan dan bukan untuk menjaga kesinambungan pengembangan KUAT.

Beberapa realisasi dari komponen yang mendukung KUAT, khususnya untuk komponen PTT dan SIPT dalam sistem manajemen keuangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan pengelolaan dana BLM. Akibatnya terjadi akumulasi dana perguliran yang belum tercatat dan ditarik kembali sebagai dana yang diperuntukan bagi anggota KUAT dalam kegiatan usaha agribisnis. Sementara itu komponen KUM yang melayani jasa keuangan simpan pinjam menunjukkan perkembangan akumulasi dana yang semakin meningkat jumlahnya baik akumulasi keuangan dari peserta maupun nasabah yang terlibat.

Sebagai saran kebijakan dalam mengembangkan KUAT agar berkelanjutan adalah dilakukan pembenahan KUAT dengan monitoring yang terkendali dari beberapa segmen yang mendukung kinerja kelembagaan, terutama adalah membangun kepercayaan petani/kelompok tani tentang kinerja KUAT sebagai suatu lembaga yang membantu petani/kelompok tani dalam mengelola dana BLM. Perlu koordinasi dan pembinaan yang berkesinambungan dalam mengatur manajemen KUAT antar instansi teknis yang terkait dengan instansi pengawal teknologi (lintas subsektor pertanian), sehingga mempermudah penjabaran dan pelaksanaan di lapang yang lebih efektif dan terkendali.

Untuk menjaga kegiatan komponen yang mendukung KUAT (PTT, SIPT dan KUM) yang lebih berkelanjutan, perlu upaya pemerintah daerah dan instansi teknis yang terkait untuk menganggarkan dan bagi kinerja KUAT yang sudah berjalan dalam APBD TK I dan II. Dengan demikian, semua asset KUAT yang ada dapat dikelola dan dimanfaatkan baik oleh anggota KUAT maupun di luar anggota KUAT, sebagai model pengembangan lembaga pelayanan jasa keuangan yang berorientasi agribisnis dan berbasis padi di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananto, dkk. 1998. Prospek Pengembangan Sistem Usahatani Pertanian Modern di Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Badan Agribisnis, Deptan 1998. Pedoman Pengembangan Koperasi Agribisnis Komoditas Unggulan (Kopaku). Badan Agribisnis, Deptan. Jakarta.

- Soentoro, Mat Syukur, Sugjarto, Hendiarto dan Herman Supriyadi, 2002. Panduan Teknis Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, departemen Pertanian.
- Soentoro, Sugjarto, Ketut Kariyasa. 1999. Program Pembentukan Modal Karya Usaha Mandiri Wanita Tani. Proyek Pengembangan Sistem Usaha Pertanian (SUP) Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Soeharto,P. 1996. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perkreditan Grammen Bank di Indonesia, Yayasan Mitra Usaha , Jakarta.